

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN 2024 DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BITUNG

Delano Mapahena¹, Agustinus Pati², Welly Waworundeng³

^{1,2,3}Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi

Email Korespondensi: delanomapahena275@gmail.com

Email: buchepati@unsrat.ac.id; wellywaworundeng@unsrat.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the 2024 Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) policy at the Bitung City Public Housing, Settlement Areas and Land Agency. Government assistance for low-income communities to encourage and increase self-reliance in improving the quality of homes and building new homes along with infrastructure, facilities, and public utilities is self-help housing stimulant assistance, hereinafter abbreviated as BSPS. The unfulfilled need for livable housing for low-income communities is the government's responsibility. In accordance with Law Number 1 of 2011 which states that the government and local governments need to provide ease of obtaining housing for low-income communities through a gradual housing development planning program in the form of providing easy financing and/or construction of infrastructure, facilities, and public utilities in residential areas. This study uses qualitative research methods. Using the Policy Implementation theory from Van Meter and Van Horn, the research results show that the implementation of the self-help housing stimulus assistance program is running well, but the level of public understanding is still lacking.

Keywords: Implementation, Policy, Assistance, Housing, Self-Help.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024 Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bitung. Bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS. Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan tanggung jawab pemerintah. Sesuai UndangUndang Nomor 1 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dalam bentuk pemberian kemudahan pembiayaan dan/atau pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan hunian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn Dari hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya berjalan dengan baik namun Tingkat pemahaman masyarakat masih kurang.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Perumahan, Swadaya.

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, dan sosial (Nugraha, 2014). Salah satunya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

386

Indexed



SINTA 4



setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia. Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau keluarga dalam melangsungkann kehidupannya. Fungsi yang sangat vital bagi kehidupan manusia pada hakikatnya adalah tempat tinggal. Manusia tidak akan dapat hidup dengan layak tanpa tempat tinggal,. Terwujudnya kebutuhan akan pangan dan sandang saja tidaklah cukup (Farida, 2020).

Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa di dasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu. Jika masalah ini tidak segera ditangani, akan memperburuk keadaan kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia yaitu dengan mencanangkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang di atur di dalam PERMEN PUPR No.07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS. Sehubungan dengan melaksanakan pembangunan masyarakat harus menyiapkan swadayanya, karena bantuan ini diwujudkan dalam bentuk barang, untuk mewujudkan bangunan rumah masyarakatnya harus berswadaya. Kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah menjadi syarat standar layak huni. Jenis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri atas Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS). Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok. Sedangkan Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

Masyarakat yang berpenghasilan rendah agar mampu berdaya guna dalam upaya meningkatkan kualitas rumahnya menjadi dasar sebagai stimulus untuk program BSPS yang merupakan bantuan dari pemerintah. Kota Bitung berdasarkan tabel di bawah ini, memiliki 8 Kecamatan dan 69 Kelurahan.

Tabel 1: Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Bitung

| Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
|----------------|------------------|
| Madidir | 8 |
| Matuari | 8 |
| Girian | 7 |
| Lembeh Selatan | 7 |
| Lembeh Utara | 10 |
| Aertembaga | 10 |
| Maesa | 8 |
| Ranowuli | 11 |
| Jumlah | 69 |

Sumber: BPS Kota Bitung tahun 2025

Tabel 2: Jumlah penduduk kota Bitung

| Kecamatan | Jumlah Penduduk (ribu) | Presentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km persegi |
|----------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Madidir | 34.9 | 16.15 | 1.675 |
| Matuari | 37.7 | 17.45 | 1.110 |
| Girian | 37.3 | 17.26 | 7.213 |
| Lembah Selatan | 10.5 | 4.85 | 410 |
| Lembah Utara | 9.4 | 4.35 | 340 |
| Aertembaga | 29.3 | 13.59 | 887 |
| Maesa | 36.0 | 16.64 | 3.707 |
| Ranowuli | 21.0 | 9.71 | 133 |
| Jumlah | 216 | 100 | 689 |

Sumber: BPS Kota Bitung tahun 2025

Pada tahun 2025, terdapat sekitar 13.570 jiwa penduduk miskin di Kota Bitung, yang mencakup persentase sebesar 5,81% dari total populasi. Jumlah ini merupakan data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data Sensus Sosial Ekonomi (Susenas) Maret 2025.

Bantuan stimulan ini adalah fasilitas pemerintah yang berupa sejumlah dana untuk diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pelaksanaan pembangunan swadaya yang dimaksud merupakan penerima bantuan stimulan dimaksudkan untuk dibantu. Perumahan swadaya merupakan rumah yang dibangun dengan prakarsa serta upaya masyarakat, dengan cara sendiri atau berkelompok, yang mencakup perbaikan, pembaharuan atau perluasan, pembangunan rumah yang baru beserta lingkungan. Masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masyarakat yang menyandang keterbatasan daya beli, maka dari itu harus memperoleh dukungan pemerintah untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Untuk melaksanakan pembangunan, masyarakat harus menyiapkan swadaya. Karena bantuan ini diwujudkan dalam bentuk barang. Menyediakan rumah yang layak huni, sehat dan tanah yang ingin dibangun rumah merupakan tanah milik sendiri menjadi sasaran program bantuan stimulan.

Masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah tinggal yang layak menjadi mekanisme pelaksanaan bantuan ini dalam memberikan perumahan yang efisien dan sarannya tepat. Program bantuan ini dilaksanakan dengan bentuk pemberian bantuan bahan bangunan yang digunakan untuk membangun atau merenovasi rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak dihuni.

Proses kebijakan publik, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan disetujui dengan memanfaatkan sumber daya serta sarana prasarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan publik yang diinginkan. Implementasi kebijakan akan lebih mudah dipahami apabila dijelaskan melalui model konkret, karena model tersebut memberikan gambaran mengenai objek, kondisi, atau proses yang terjadi.

Pelaksanaan program dapat dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan melalui penggunaan sarana dan prasarana yang telah dipilih secara tepat. Ukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari dua hal utama, yaitu apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan apakah tujuan program tersebut berhasil dicapai. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan kebijakan publik, tahap implementasi menjadi bagian yang paling penting karena menentukan keberhasilan kebijakan secara keseluruhan.

Hasil observasi awal di Kota Bitung, pelaksanaan program ini ditangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bitung. Adanya program ini, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapat bantuan karena kondisi bangunan yang tidak memenuhi standar seperti dinding yang masih menggunakan kayu dan atap rumah sudah tidak layak, sehingga program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSP) membawa dampak perubahan kondisi fisik rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dalam pemahamannya yaitu data yang diwujudkan dalam bentuk rangkaian kata-kata dan bukan dalam bentuk angka. Menurut Moleong (2006), Fokus dalam penelitian ini Adalah mengkaji tentang implementasi kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kota Bitung yang diterapkan hingga tahun 2023, menggunakan teori dari Meter dan Horn dalam Agustino 2017:126 dengan indicator sebagai berikut:

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya Kebijakan
3. Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik
4. Komunikasi Antar Organisasi
5. Karakteristik Agen Pelaksana
6. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Menurut Lofland dalam Moleong (2006), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data Adalah Data Primer dan Data Sekunder.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode yang umum digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam (in depth interview) dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2001). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data kombinasi, antara lain sebagai berikut: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

PEMBAHASAN

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menempati hunian yang layak, sehat, dan aman. Program ini menekankan pada prinsip pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif penerima bantuan dalam proses pembangunan atau perbaikan rumahnya sendiri. Implementasi kebijakan BSPS di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bitung menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan BSPS di Kota Bitung melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu tahap perencanaan, penetapan calon penerima bantuan, pelaksanaan pembangunan, serta tahap pengawasan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan pendataan terhadap rumah tangga yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki rumah yang tidak layak huni. Pendataan ini dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan, sehingga diharapkan data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Selanjutnya pada tahap penetapan calon penerima bantuan, dilakukan proses verifikasi dan validasi data calon penerima BSPS. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria seperti memiliki rumah tidak layak huni, berpenghasilan rendah, serta memiliki status kepemilikan lahan yang jelas. Dalam konteks ini, peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sangat penting dalam melakukan seleksi dan penetapan penerima bantuan secara transparan dan akuntabel.

Pada tahap pelaksanaan, program BSPS di Kota Bitung dilaksanakan dengan pendekatan swadaya masyarakat. Artinya, masyarakat penerima bantuan tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga berperan sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan rumahnya. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah bersifat stimulan, yaitu berupa dana yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan, sementara tenaga kerja sebagian besar berasal dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini tidak

hanya membantu mengurangi biaya pembangunan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap rumah yang dibangun atau diperbaiki.

Selain itu, pelaksanaan program BPS juga melibatkan tenaga fasilitator lapangan yang bertugas memberikan pendampingan kepada masyarakat penerima bantuan. Fasilitator ini membantu masyarakat dalam merencanakan pembangunan rumah, mengelola penggunaan dana bantuan, serta memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Kehadiran fasilitator menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien.

Berikut ini Adalah jumlah bantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bitung melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari tahun 2020-2023:

Tabel 3: Jumlah Penerimaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari tahun 2020-2023 Kota Bitung

| Tahun | Lokasi | Jumlah Unit | Nilai (Rp) | Sumber Dana |
|---------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|
| 2020 | Kecamatan Madidir | 78 | 1.365.000.000 | DAK Dinas Perkimtan TA 2020 |
| 2021 | Kecamatan Madidir | 30 | 1.040.000.000 | DAK Dinas Perkimtan TA 2021 |
| | Kecamatan Maesa | 22 | | |
| 2022 | Kecamatan Madidir | 2 | 60.000.000 | DAK Dinas Perkimtan TA 2022 |
| | Kecamatan Maesa | 1 | | |
| 2023 | Kecamatan Madidir | 9 | 500.000.000 | DAU Dinas Perkimtan TA 2023 |
| | Kecamatan Matuari | 13 | | |
| | Kecamatan Maesa | 1 | | |
| JUMLAH | | 156 | 2.965.000.000 | |

Sumber: Kantor Disperkkimtan Kota Bitung, 2026

Dari data diatas terlihat bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terakhir diimplementasikan pada tahun 2023 dengan jumlah 32 Unit rumah dan yang terbanyak terjadi di tahun 2020 yakni 78 unit rumah. Dari sumber dana yang disediakan bersumber dari dana alokasi umum dinas dan dana alokasi khusus dinas dengan total anggaran sebanyak Rp. 2.965.000.000.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Kota Bitung, masing-masing unit rumah mendapatkan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang dibagi Rp. 17.500.000 untuk biaya bahan dan Rp. 2.500.000 untuk biaya jasa tukang. Pemberian juga dilakukan melalui 2 (dua) tahap pencairan Dimana syaratnya laporan tahap pertama sudah dilaporkan dan kemudian dana tahap kedua dicairkan.

Adapun penyebab tidak adanya bantuan pada tahun 2024-2025 menurut kepala dinas Perkimtan Kota Bitung karena kebijakan pimpinan yakni walikota serta dengan adanya efesiensi anggaran sehingga beberapa program ditunda dan pada tahun 2026 baru dimulai lagi dengan diusulkannya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yakni sebanyak 1.040 unit rumah dan baru disetujui sekitar 765 unit rumah. Hal ini menurut kepala dinas masih lagi perlu mengunggu persetujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang sering muncul adalah keterbatasan anggaran yang tersedia dibandingkan dengan jumlah rumah tidak layak huni yang masih cukup besar di Kota Bitung. Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat segera menerima program BSPS. Selain itu, kendala administratif seperti kelengkapan dokumen kepemilikan tanah juga sering menjadi hambatan bagi masyarakat untuk dapat menjadi penerima bantuan.

Kendala lainnya berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya optimal. Meskipun program BSPS menekankan pada prinsip swadaya, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam hal tenaga, waktu, maupun sumber daya tambahan untuk mendukung proses

pembangunan rumah. Kondisi ini terkadang menyebabkan proses pembangunan rumah berjalan lebih lambat dari yang direncanakan.

Meskipun demikian, secara umum implementasi kebijakan program BSPS di Kota Bitung telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program ini mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak dan sehat. Selain itu, program ini juga mendorong tumbuhnya semangat gotong royong di tengah masyarakat, karena proses pembangunan rumah seringkali melibatkan bantuan dari tetangga dan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, implementasi kebijakan program BSPS di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bitung dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di masa yang akan datang, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. Selain itu, perlu juga adanya peningkatan alokasi anggaran serta penyederhanaan prosedur administratif agar lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari program BSPS. Melalui upaya tersebut, diharapkan program BSPS dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan permukiman yang layak huni di Kota Bitung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bitung pada dasarnya telah ditetapkan secara jelas oleh pemerintah pusat melalui pedoman teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Standar kebijakan tersebut mencakup berbagai kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan, antara lain kondisi rumah yang tidak layak huni, status kepemilikan rumah, serta kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari sisi sumber daya manusia, pelaksanaan program BSPS melibatkan berbagai pihak, antara lain aparat pemerintah daerah, tenaga pendamping, pemerintah kecamatan, serta pemerintah kelurahan. Tenaga pendamping memiliki peran penting dalam memberikan arahan teknis kepada masyarakat penerima bantuan serta melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan rumah. Dari sisi sosial, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat di Kota Bitung masih memiliki nilai-nilai gotong royong yang cukup kuat. Dalam proses pembangunan rumah penerima bantuan, masyarakat seringkali saling membantu baik dalam bentuk tenaga kerja maupun dukungan material. Semangat kebersamaan tersebut menjadi salah satu faktor yang mempercepat proses pembangunan rumah.

Komunikasi antarorganisasi dalam pelaksanaan Program BSPS di Kota Bitung pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaksana teknis di lapangan melalui berbagai saluran komunikasi formal maupun informal. Disposisi atau sikap pelaksana dalam Program BSPS dinilai cukup baik oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui sikap ramah, sopan, responsif, serta adanya kepedulian dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan

REFERENSI

- Agustino, Leo, (2017), *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Faisal, Sanapiah. 2009, *Format-Format penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7, 35–47.
- Grindel, Merille .S (ed). 1980 . *Politics and Policy Implementation and Public Policy in the trird World*. New Jersey: Princenton University Press.
- Khalawati, A. (2023). *Konstruksi Sosial Penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sebagai Identitas Sosial: Studi Kasus Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten*

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

391

Indexed



SINTA 4



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 4 April 2026

- Karanganyar. Journal of Development and Social Change. (no DOI listed)
- Mamangkey A, Lumolos J dan Pangemanan F (2019), dengan judul penelitian “Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Eksekutif Universitas Sam Ratulangi. 2019
- Manoppo R. Pati A, Kimbal A. 2020. Implementasi Kebijakan Bela Negara Untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional Di Wilayah Komando Distrik Militer 1309 / Manado. Jurnal Agri Moleong, J. L.. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.Sosioekonomi. Unsrat
- Marwiyah, Siti, 2022. “Kebijakan Publik” (t.p.).
<http://repository.upm.ac.id/3995/1/BUKU%20KEBIJAKAN%20PUBLIK%202022..>
- Miftahul Jannah, H., Sastrawan, E., & Wahyuni Adda, H. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Siwalembu Kecamatan Sojol. Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan. DOI:10.55606/jempper.v2i2.1412.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. 1994. An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications
- Moleong, J. L.. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Mustopadidjaja. AR. 2013. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Cetakan Pertama. Perum Percetakan Negara RI. Jakarta.Mochtar Mas’ud dan Colin MacAndrews. 2001. Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nuarizal. 2018. Pertumbuhan Rumah Inti pada Perumahan Layak Huni bagi Keluarga Miskin di Dusun Kayu Gadang Kota Sawahlunto. Universitas Diponegoro:Tesis yang dipublikasikan
- Nugraha, A. F. (2014). implementasi program Pemugaran sosial rumah tidak layak huni (RS_RTLH) di Kota Serang. 73.
- Nuraida M, & SD, Z. R. (2017). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2), 1-10
- Paunno, J., Rumerung, D., & Pattilouw, D. R. (2024). Analisis Pengaruh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Buru Selatan. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ). DOI:10.37385/msej.v6i4.8356.
- Polinggapo, J., & Syamsiar, I. (2023). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kantanan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol. Innovative: Journal of Social Science Research. DOI:10.31004/innovative.v5i1.17860.
- RAF Balada. (2023). Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo. Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan. DOI:10.52166/madani.v16i02.7390.
- Saefullah D. H. A. 2007. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan kedua. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD.Framework” Administration Society. Vol. 6 No. 4 February 1975.
- Salim, 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara
- Siagian, Sondang P. 2017. Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Siagian. S.P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung. Wibawa,Samudra. Et.Al., 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tendean Elysa Desyra, Salmin Dengo dan Very Y Londa (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tendean. Jurnal Administrasi public Unsrat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

392

Indexed



SINTA 4



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 4 April 2026

Tigauw F.C.S. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kampung Dobut
Oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat. Jurnal IPDN

Wahab A.2007. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi
Aksara.

Wibawa S. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta. PT Raja Grafindo Prasada